

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK

Bank Syariah Indonesia (BSI) menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor, baik *green sector* maupun *brown sector*. BSI memiliki kebijakan khusus untuk memastikan pembiayaan tetap sejalan dengan komitmen keberlanjutan (*green commitment*).

Sejak 2023, BSI berkomitmen untuk berpartisipasi dalam upaya penurunan emisi melalui penerapan *Sustainable Finance*. Langkah ini diwujudkan dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi pembiayaan, termasuk:

- Penambahan *negative list* dalam kebijakan pembiayaan.
- Penerapan *portfolio restriction* pada sektor brown.
- Pencantuman *exclusion list* dalam standar prosedur pembiayaan.
- Pemutakhiran *Industry Acceptance Criteria* (IAC) dengan menambahkan aspek lingkungan.
- Penetapan Green Financing Sector dengan memerhatikan prinsip *Do No Significant Harm* (DNSH).

Distribusi Pembiayaan per Sektor (2024)

Sector	Value (Rp M)
Agriculture, Hunting, and Forestry	23,550
Fishery	720
Oil and Gas	319
Coal	1,261
Other Mining and Exploration	1396
Manufacturing Industry	12,765
Electricity, Gas, and Water	6,756
Construction	18,843
Wholesale and Retail Trade	19,747
Provision of Accomodation, Food, and Beverages	3,204
Transportation, Storage, and Communication	8,647
Financial Intermediaries	5,807
Real Estate, Leasing, and Business Services	5,299
Government Administration, Defense, and Mandatory Social Insurance	-
Education Services	4,929
Healthcare and Social Services	9,402
Community, Socio-Cultural, Entertainment, and Other Individual Services	3,732
Personal Services of Households	168
Activities with Unclear Boundaries	-
Household	151,918
Other Non-Business Sectors	19
Total	278,481

Pada tingkat nasional, otoritas keuangan telah menetapkan batasan eksposur untuk sektor brown, yaitu:

- Industri batubara: Rp14,42 triliun.
- Industri minyak dan gas: Rp16,82 triliun.

Jika dibandingkan dengan batasan tersebut, eksposur BSI tergolong relatif kecil:

Sektor-sektor ini hanya menyumbang sekitar 0,57% dari total portofolio pembiayaan BSI yang masih berjalan.

Hal ini menunjukkan bahwa eksposur BSI terhadap industri brown masih berada jauh di bawah batas nasional dan menegaskan komitmen bank untuk secara bijak dalam menyelaraskan portofolionya dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang.

Kebijakan Pembiayaan Berdasarkan Sektor

a. Exclusion List (Larangan Pembiayaan)

BSI tidak membiayai kegiatan:

- Illegal logging dan perdagangan kayu dari hutan tidak lestari.
- Kerja paksa, eksploitasi anak, atau pelanggaran HAM.
- Produksi/perdagangan satwa liar.
- Kegiatan yang diharamkan secara syariah (senjata ilegal, narkoba, minuman beralkohol, pengembangbiakan/penyembelihan babi).
- Pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Usaha yang tidak memenuhi ketentuan AMDAL atau membahayakan lingkungan.

b. Kebijakan Sektoral

- Kelapa Sawit:
 - Lahan tidak berada di hutan lindung.
 - Wajib memiliki AMDAL.
 - Memiliki sertifikat ISPO/RSPO atau kontrak dengan lembaga sertifikasi ISPO.
 - Minimal peringkat Blue PROPER.
- Oil & Gas:
 - Wajib memiliki AMDAL.
 - Memiliki *Plan of Development* (POD) yang disetujui SKK Migas.

- Industri Pengolahan:
 - Wajib memiliki AMDAL.
 - Memiliki sarana pengolahan limbah.
- Batubara:
 - Pembiayaan hanya untuk tahap produksi (bukan eksplorasi).
 - Memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).
 - Memiliki status *Clean and Clear* (CNC).
 - Memiliki AMDAL.

c. Pembiayaan Hijau (*Green Financing*)

BSI menyalurkan pembiayaan hijau kepada sektor-sektor yang memenuhi kriteria berikut:

- Termasuk dalam 11 kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).
- Tidak masuk dalam *Exclusion List*.
- Tidak melanggar prinsip *Do No Significant Harm* (DNSH).

Prinsip Transisi dan *Just Transition*

BSI menyadari bahwa transisi menuju ekonomi rendah karbon adalah proses bertahap. Oleh karena itu, BSI:

- Tetap membiayai sektor-sektor yang masih dalam tahap awal adopsi praktik keberlanjutan.
- Menerapkan *responsible financing standards* untuk mendorong perbaikan.
- Memberikan transition support kepada industri prioritas nasional agar transisi berlangsung adil dan inklusif (*just transition*).